

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah sekarang ini, prakarya dan peran aktif masyarakat beserta lembaga perencanaan daerah ditingkatkan, pengawasan dan koordinasi pembangunan makin dimantapkan serta fungsi lembaga perwakilan daerah lebih didayagunakan sebagai perwujudan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Namun demikian, masih harus diakui bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masih terbatas, sehingga prinsip otonomi yang nyata dan pertanggungjawaban masih harus ditunjang dengan dikonsentrasikan yaitu administrasi daerah dan fungsi pemerintah di daerah yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat, dan kebijakan lain dapat mendorong kemajuan dan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan tersebut maka pemerintah melaksanakan otonomi daerah. Menurut ketentuan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah sendiri (PADS). Usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri berpangkal pada potensi dan kemampuan ekonomi untuk kapasitas administrasi daerah dalam menyelenggarakan perpajakan, retribusi daerah

yang meliputi: sistem dan prosedur, organisasi dan sumber daya manusia, dan fasilitas penyelenggara (sarana dan prasarana).

Dalam hal ini dipenda kabupaten Batang merupakan pelaksana kepala daerah di kabupaten Batang di bidang pendapatan daerah. Dipenda sebagai pengkoordinasi dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pungutan, pengumpulan dan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan asli daerah lainnya ke dalam kas daerah.

Dana yang diterima oleh pemda digunakan untuk pengeluaran rutin, antara lain berupa: pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan, dan pengeluaran lainnya. Berbagai upaya telah diusahakan agar tercapai tujuan peningkatan penerimaan daerah antara lain melalui peningkatan efektifitas dan efisien penggunaan pajak daerah, retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pelaksanaan penggalan pendapatan asli daerah (PAD) harus tetap memperhatikan berbagai aspek lain seperti fiskal dan lain-lain, dalam rangka upaya pencapaian pemerataan pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah. Dengan adanya kebijaksanaan yang tepat diharapkan akan terjadi peningkatan produk domestik regional (PPDR) yang pada akhirnya akan terjadi peningkatan pula penerimaan pendapatan asli daerah di masing-masing daerah.

Seperti diketahui salah satu komponen pendapatan asli daerah adalah Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Retribusi daerah merupakan salah satu bagian dari pendapatan asli daerah sendiri. Dalam Undang-undang no. 18 tahun 1997 tentang ketentuan umum bahan retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian ijin tertentu yang disediakan

dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan”. Sedangkan retribusi pasar adalah pembayaran atas fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa pelataran / halaman los, kios, dan pedagang yang dikelola oleh perusahaan daerah (PD) pasar (Perda No.5 Tahun 1999).

Besar kecilnya pungutan retribusi pasar sangat dipengaruhi oleh banyaknya faktor, antara lain: tempat yang dikenakan, kuantitas dan kualitas jasa pelayanan yang diberikan, dan tuntutan kebutuhan masyarakat atas jasa pelayanan tersebut. Selanjutnya untuk melaksanakan di masing-masing daerah, pungutan retribusi pasar dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah.

Penyusunan penetapan dan pengesahan peraturan daerah dimaksud sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penulis melakukan penelitian mengenai ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BATANG PADA TAHUN 1998-2002.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah sangat penting supaya inti masalah dan obyek yang diteliti dapat tercapai tanpa dikaburkan oleh masalah yang lain, mengingat ada beberapa faktor (jumlah pedagang, jumlah kios, jumlah los, tarif retribusi, jumlah petugas pemungut, luas plataran dan kelas pasar) yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar tersebut, maka dalam kajian ini penulis hanya akan membatasi pada faktor-faktor yang menonjol yaitu jumlah pedagang, jumlah kios dan jumlah los yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar pada tahun 1998-2002.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Adakah pengaruh jumlah pedagang, jumlah kios, dan jumlah los terhadap penerimaan retribusi pasar di kabupaten Batang?”

D. Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang diharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat maupun daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel jumlah pedagang, jumlah kios dan jumlah los pasar terhadap penerimaan retribusi pasar.
2. Untuk mengetahui jumlah retribusi pasar di kabupaten Batang.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan saran dan pikiran bagi instansi terkait untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan penentuan kebijaksanaan.
2. Sebagai pengetahuan dan salah satu sumber acuan bagi kegiatan keilmuan dalam masalah yang sama di masa mendatang.

F. Sistematika Skripsi

Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan abstrak.

Bagian Isi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang mengandung masalah yang sedang diteliti terdiri dari : tinjauan pustaka, sistem penerimaan daerah di Indonesia, sumber pendapatan daerah, retribusi, retribusi pasar, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian metode penelitian, metode penentuan obyek yang terdiri atas populasi, sampel, sampling, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum pelaksanaan retribusi pasar, penyajian data, analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

Bagian akhir

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran